

**Analisis Perbandingan PSAK No. 18
Tahun 1994 dan Revisi 2010
Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan
STUDI KASUS PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BOGOR**

*PSAK 18 and
Financial Report*

17

Ervina Indri Sari dan Desi Efrianti

*Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia*

E-Mail: desiefrianti@yahoo.com

Submitted:
JANUARI 2014

Accepted:
APRIL 2014

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the comparison between PSAK No. 18 (1994) and PSAK No. 18 (revised 2010), and the effect of PSAK No. 18 changes to the financial statements on PT. TASPEN. Changes in PSAK No. 18 Among other things, the scope of which is wider than the pension fund entities that are analogous to finish work because entering retirement age but completed work in accordance with the plan or contract work. Actuarial present value, is now calculated and reported using current salary levels or projected salary levels up to the time of Retirement attendees. Financial statements, for defined contribution plans and defined benefit plan is split into the separate financial statements. And the presentation of the fair value of investments at fair value. The authors conclude that, given that PSAK No. 18 (revised 2010) came into effect on January 1, 2012, the readiness PT. TASPEN (Persero) in applying PSAK No. 18 (revised 2010) should be considered to receive this new standard.

Keywords: PSAK No. 18 (1994), PSAK No. 18 (revised 2010)

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak pekerja yang menghadapi ketidakpastian dalam hidupnya, baik itu ketidakpastian spekulatif maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian spekulatif merupakan suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Sedangkan ketidakpastian murni merupakan sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Kebutuhan rasa aman bagi pekerja merupakan salah satu contoh dari ketidakpastian murni, misalnya untuk memperoleh jaminan hidup baik jaminan hari tua maupun jaminan setelah masa kontrak kerja selesai.

Untuk menghadapi ketidakpastian murni bagi pekerja diperlukan cara yang dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko, yaitu dengan cara mengikuti program manfaat purnakarya. Program manfaat purnakarya sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja memerlukan suatu standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan program manfaat purnakarya. Untuk itu dilakukan perubahan PSAK No. 18 (1994) Akuntansi Dana Pensiun menjadi PSAK No. 18 (revisi 2010) Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.

Program manfaat purnakarya sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja memerlukan suatu standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan program manfaat purnakarya. Untuk itu dilakukan perubahan PSAK No. 18 (1994) Akuntansi Dana Pensiun menjadi PSAK No. 18 (revisi 2010) Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 2 No. 1, 2014
pg. 17-30
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

Indonesia telah memiliki standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia tersebut lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia, yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. Sejak penerbitan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tahun 1994, IAI terus melakukan revisi secara terus-menerus, seperti melakukan peningkatan standar yang ada, menambahkan standar baru, dan interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pada periode 1994-2004, ada perubahan kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukkan. Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia.

Di Indonesia sendiri pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak tahun 1995 sampai tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar.

Kemudian pada periode 2008-2010, merupakan tahap adopsi yaitu adopsi seluruh IFRS ke PSAK. Persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Pada periode 2011, merupakan tahap persiapan akhir yaitu dengan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang diperlukan dan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. Pada periode 2012, merupakan tahap implementasi yaitu penerapan pertama kali PSAK berbasis IFRS secara bertahap dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Tujuan Penelitian ini untuk :

1. Mengetahui perbandingan PSAK No. 18 (1994) dan PSAK (revisi 2010).
2. Mengetahui pengaruh perubahan PSAK No. 18 (1994) menjadi PSAK No. 18 (revisi 2010) terhadap laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Menurut Ahmed Riahi (2004, 16) Standar Akuntansi Keuangan adalah :

Aturan baku yang mengatur penyusunan laporan keuangan diterima secara umum didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidak patuhan, standar akuntansi terdiri dari tiga bagian yaitu deskripsi masalah yang harus dipecahkan, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori yang ada solusi yang disarankan.

Standar Akuntansi Keuangan menurut PSAK No. 01 (revisi 2009) adalah "Pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi

Kuangan Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya”.

International Financial Reporting Standar (IFRS)

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar yang dibuat oleh *International Accounting Standards Boards* (IASB) dengan tujuan memberikan kumpulan standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Dengan konvergensi IFRS, PSAK akan bersifat *principle-based* dan memerlukan *professional judgment*, senantiasa peningkatan kompetensi harus pula dibarengi dengan peningkatan integritas. IAI dalam program kerjanya telah menetapkan peta arah (*roadmap*) program konvergensi IFRS terhadap PSAK yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama tahap adopsi (2008 - 2011) yang meliputi Adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua tahap persiapan akhir (2011) yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. Ketiga yaitu tahap implementasi (2012) yaitu penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Dana Pensiun

Menurut PSAK No. 18 (1994) menyatakan bahwa : “Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. Menurut UU No. 11 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 bahwa “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.

Sedangkan menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman (2006, 281) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, “Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwada pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jenis-jenis Dana Pensiun terbagi dua yaitu : (1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun luran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja, (2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Menurut Kadarisman, Sari Wahyuni dalam bukunya Manajemen Dana Pensiun Indonesia (2010, 4) pada dasarnya program pensiun memiliki tiga (3) fungsi, yaitu : Fungsi Asuransi, Fungsi Tabungan dan Fungsi Pensiun.

Akuntansi Dana Pensiun menurut PSAK No. 18 (1994)

PSAK No. 18 (1994) Akuntansi Dana Pensiun menjelaskan tentang akuntansi dan pelaporan oleh Dana Pensiun kepada pihak yang berkepentingan. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan kepada masing-masing peserta program pensiun tentang hak manfaat pensiun mereka.

PSAK No. 18 (1994) tidak mengatur tentang kesejahteraan karyawan dalam bentuk lainnya, misalnya kewajiban pemberian pesangon, pengaturan kompensasi yang ditangguhkan (*deferred compensation management*), tunjangan kesehatan dan kesejahteraan program bonus dan lain-lain. Program jaminan kesejahteraan sosial yang diwajibkan pemerintah (jamsostek) juga diluar lingkup pernyataan ini. PSAK No. 18 (1994) berlaku untuk Program Pensiun luran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti

(PPMP), sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Menurut PSAK No. 18 (revisi 2010) Program manfaat purnakarya yaitu perjanjian yang mana entitas menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau lumpsom) ketika manfaat tersebut, atau iuran kepada program manfaat purnakarya, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas. Program manfaat purnakarya kadang dikenal dengan berbagai istilah, seperti "program pensiun", "tunjangan hari tua", atau "program manfaat purnakarya". Program manfaat purnakarya merupakan suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program purnakarya. Oleh karena itu diperlukan suatu standar khusus yang mengatur program manfaat purnakarya. Untuk itu dibuatlah PSAK No. 18 (revisi 2010) atas Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya yang merupakan revisi dari PSAK No. 18 (1994) atas Atas Akuntansi Dana Pensiun. PSAK No. 18 (revisi 2010) diterapkan untuk laporan keuangan program manfaat purnakarya.

Menurut PSAK No. 18 (revisi 2010) tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan aktivitas program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. Tujuan ini biasanya dapat dicapai dengan menyusun laporan keuangan yang antara lain terdiri atas:

- a. Penjelasan atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat purnakarya serta kenggotaan dan syarat dan ketentuannya.
- b. Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode.
- c. Informasi aktuarial sebagai bagian dari laporan tersebut atau sebagai laporan terpisah.
- d. Penjelasan atas kebijakan investasi.

Akuntansi Dana Pensiun Menurut PSAK No. 18 (Revisi 2010)

PSAK No. 18 (revisi 2010) atas akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya merevisi PSAK No. 18 (1994) akuntansi dana pensiun. PSAK No. 18 (revisi 2010) tidak mengatur imbalan kerja dalam bentuk lain, misalnya kewajiban pemberian pesangon, perjanjian kompensasi yang ditangguhkan, tunjangan cuti jangka panjang, program pensiun dini atau pemutusan kontrak kerja khusus, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, atau program bonus. Jaminan sosial pemerintah juga diluar ruang lingkup PSAK No. 18 (revisi 2010).

Menurut PSAK No. 18 (revisi 2010) laporan keuangan program manfaat purnakarya dibagi menjadi program iuran pasti dan program imbalan pasti.

1. Laporan Keuangan Program Iuran Pasti, meliputi Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan penjelasan mengenai kebijakan pedanaan.
2. Laporan Keuangan Program Imbalan Pasti, meliputi Laporan Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, dan Surplus atau defisit, atau Laporan aset neto berupa catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, atau Acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang disertakan dalam laporan aktuarial.

Paragraf 27 PSAK No. 18 (revisi 2010) menjelaskan bahwa untuk program imbalan pasti, informasi yang disajikan dalam salah satu format berikut yang mencerminkan perbedaan praktik pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial :

- a. Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat purnakarya juga berisi laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat

- purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Laporan keuangan dapat disertai dengan laporan aktuaris terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji,
- b. Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuaris yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, dan
 - c. Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk menggambarkan / melukiskan keadaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan metode komparatif adalah suatu metode yang bersifat membandingkan.

Penelitian ini bertujuan selain mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh mengenai PSAK No. 18 (1994) atas Akuntansi Dana Pensiun dan PSAK No. 18 (revisi 2010) atas Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya, tetapi membandingkannya juga satu sama lain, sehingga didapatkan pemahaman atas perbedaan penerapan PSAK No. 18 (1994) dan PSAK No. 18 (revisi 2010) dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan PSAK No. 18 (1994) atas akuntansi dana pensiun dan PSAK No. 18 (revisi 2010) atas akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya terhadap laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan PSAK No. 18 (revisi 2010) dengan PSAK No. 18 (1994)

1. Ruang Lingkup
 - a. Ruang Lingkup PSAK No. 18 (1994) adalah akuntansi dan pelaporan dana pensiun, yang sering dianalogikan selesai bekerja karena memasuki umur pensiun.
 - b. Sedangkan Ruang Lingkup PSAK No. 18 (revisi 2010) adalah akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya. Penggunaan kata purnakarya karena hal ini berkenaan dengan keadaan atau kedudukan setelah selesai berdinis, bukan hanya dana pensiun, bisa saja selesai bekerja sesuai dengan perencanaan atau kontrak kerjanya. Hal ini membuat Ruang Lingkup PSAK No. 18 (revisi 2010) jauh lebih luas dibandingkan dengan Ruang Lingkup PSAK No. 18 (1994).
2. Nilai Kini Aktuarial
 - a. Dalam PSAK No. 18 (1994) dijelaskan bahwa Kewajiban Aktuarial atau Nilai Kini Aktuarial ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.
 - b. Sedangkan dalam PSAK No. 18 (revisi 2010) dijelaskan bahwa Nilai Kini Aktuarial dari Manfaat Purnakarya Terjanji dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan waktu purnakarya peserta.
3. Laporan Keuangan Dana Pensiun
 - a. Laporan Keuangan Dana Pensiun dalam PSAK No. 18 (1994) baik Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti terdiri dari : Laporan

- aset bersih, Laporan perubahan aset bersih, Neraca, Perhitungan hasil usaha, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan
- b. Sedangkan Laporan Keuangan Dana Pensiun dalam PSAK No. 18 (revisi 2010) terbagi menjadi Laporan Keuangan yang terpisah antara Laporan Keuangan Program Luran Pasti dengan Laporan Keuangan Program Manfaat Pasti, sebagai berikut :
 1. Laporan Keuangan Program Luran Pasti, mencakup :
 2. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
 3. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan
 - c. Laporan Keuangan Program Manfaat Pasti mencakup, salah satu dari :
 1. Laporan yang menyajikan :
 - a. Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
 - b. Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji
 - c. Surplus atau defisit, atau
 2. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, termasuk salah satu dari :
 - a. Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, atau
 - b. Referensi nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji menyertai laporan aktuaris.
 4. Penyajian Nilai Wajar Investasi
 - a. Penilaian investasi dalam PSAK No. 18 (1994) dijelaskan bahwa investasi diukur pada nilai wajar dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang tunai, rekening giro, dan deposito dinilai dengan nilai nominal
 - b. Sertifikat deposito, Surat Berharga BI, Surat Berharga Pasar Uang, dan Surat Pengakuan Utang lebih dari satu tahun dinilai dengan nilai tunai
 - c. Surat berharga yang diperjualbelikan dinilai dengan nilai pasar
 - d. Penyertaan saham dinilai dengan nilai appraisal
 - e. Investasi pada tanah dan bangunan dinilai dengan nilai appraisal
 - b. Sedangkan penilaian investasi dalam PSAK No. 18 (revisi 2010) dijelaskan bahwa penilaian investasi pada program manfaat purnakarya menggunakan nilai wajar. Pada kasus surat berharga yang diperdagangkan (*marketable securities*), maka nilai wajar adalah nilai pasar. Untuk investasi program purnakarya yang dimiliki yang mana tidak mungkin dilakukan estimasi nilai wajar, diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan.

Penerapan PSAK No. 18 (1994) pada PT. Taspen (Persero) Cabang Bogor

Penyusunan akuntansi dana pensiun pada PT. Taspen (Persero) Cabang Bogor ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan oleh kantor pusat PT. Taspen (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK-01/DIR/2005 tanggal 3 Januari 2005. Penetapan kebijakan akuntansi perusahaan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor : 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, yang ditetapkan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995.
- b. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor : 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa, yang ditetapkan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1996.
- c. Perubahan lingkungan internal perusahaan dalam bentuk dilaksanakannya restrukturisasi dan kebijakan internal lainnya yang akan membawa akibat terjadinya perubahan struktural organisasi, proses bisnis, dan pengelolaan.
- d. Sejalan dengan kondisi di atas, maka tuntutan kebutuhan manajemen perusahaan akan informasi akuntansi dan keuangan semakin beragam dan akurat agar dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

PSAK No. 18 (1994) tentang Akuntansi Dana Pensiun telah diterapkan oleh PT. Taspen (Persero) cabang Bogor sejak tanggal 1 Januari 1996. PSAK No. 18 (1994) dijadikan suatu pedoman bagi penyusunan dan pelaporan laporan keuangan dana pensiun PT. Taspen (Persero) cabang Bogor.

Tabel 1 Perbandingan PSAK No. 18 (revisi 2010) dengan PSAK No. 18 (1994)

PSAK No. 18 (revisi 2010)	PSAK No. 18 (1994)
Ruang Lingkup: Program Manfaat Purnakarya. Nilai Kini Aktuarial dari Program Manfaat Purnakarya Terjanji : Penggunaan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi dalam menghitung nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat purnakarya.	Ruang Lingkup : Entitas Dana Pensiun. Tidak diatur
Laporan Keuangan Program Manfaat Purnakarya. Laporan Keuangan Program Iuran Pasti : a. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan b. Penjelasan mengenai kebijakan pedanaan.	Laporan Keuangan Pogram Dana Pensiun, baik program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti terdiri dari : a. Laporan aset bersih, b. Laporan perubahan aset bersih, c. Neraca, d. Perhitungan hasil usaha, e. Laporan arus kas, f. Catatan atas laporan keuangan.
Laporan Keuangan Program Imbalan Pasti : a. Laporan yang menyajikan : 1. Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, 2. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, 3. Surplus atau defisit, atau b. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, yang mencakup salah satu dari : 1. Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, atau 2. Acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang disertakan dalam laporan aktuarial.	Penilaian Investasi : Diukur pada nilai wajar dengan rincian sebagai berikut : 1. Uang tunai, rekening giro, & deposito (nilai nominal). 2. Sertifikat deposito, Surat Berharga BI, Surat Berharga Pasar Uang, surat pengakuan utang lebih dari 1 tahun (nilai tunai). 3. Surat berharga yang diperjual/belikan (nilai pasar). 4. Penyertaan saham (nilai appraisal). 5. Investasi pada tanah & bangunan (nilai appraisal)
Penilaian Investasi : Pada program manfaat purnakarya menggunakan nilai wajar.	

PT. Taspen mengelola dana pensiun sebagai suatu lembaga yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana milik peserta program pensiun yang dikelola secara profesional. Untuk itu sebagai pengurus dana pensiun, PT. Taspen (Persero) secara berkala berkewajiban untuk membuat laporan tertentu sehubungan dengan pertanggung-jawabannya. Salah satu laporan penting adalah laporan keuangan. Yang dimana laporan keuangan dana pensiun berbeda dengan laporan keuangan perusahaan lainnya, maka PT. Taspen (Persero) menerapkan PSAK No. 18 (1994) tentang Akuntansi Dana Pensiun dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan.

Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang dikelola PT. Taspen (Persero) merupakan Program pensiun. Dalam PSAK No. 18 (1994) dijelaskan bahwa jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan pemberi kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha. Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun, PT. Taspen (Persero) berkewajiban untuk membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. PT.

Taspen (Persero) melakukan perhitungan untuk Program pensiun yang telah disesuaikan dengan PSAK No. 18 (1994), yaitu sebagai berikut :

Pensiun Pokok : $2,5\% \times GP \text{ Terakhir} \times MK$
--

Keterangan :

GP Terakhir = Gaji Pokok Terakhir

MK = Masa Kerja

1. Pengakuan dan Pengukuran dalam Program Iuran Pasti

Dalam Program Iuran Pasti jika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama satu periode, maka entitas mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti atas jasa pekerja : (a) Sebagai liabilitas (beban terakru), setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Jika iuran tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar dimuka) sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau dikembalikan. (b) Sebagai beban, kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset.

2. Pengungkapan

Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Entitas mengungkapkan informasi tentang iuran kepada program iuran pasti untuk personil manajemen kunci. PT. Taspen (Persero) dalam pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala, tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, dialihkan atau disita. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Besarnya manfaat pensiun dipengaruhi oleh Masa Kerja.

Selain dana pensiun PT. Taspen (Persero) juga mengelola asuransi berupa program Tabungan Hari Tua (THT). Program Tabungan Hari Tua (THT) merupakan suatu program asuransi sosial yang berupa jaminan keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun, atau sebelum mencapai usia pensiun dikarenakan berhenti secara hormat atau dengan tidak terhormat, atau meninggal pada saat aktif.

Kantor pusat PT. Taspen (Persero) membuat laporan keuangan untuk program pensiun yang sesuai dengan PSAK No. 18 (1994) yang terdiri dari :

1. Laporan Aktiva Bersih

Laporan Aktiva Bersih bertujuan memberikan informasi tentang jumlah kekayaan (aktiva) bersih pensiun yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Tujuan laporan ini adalah menyediakan informasi mengenai : (a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. (b) Hubungan antara transaksi dengan peristiwa lain. (c) Bagaimana pengguna sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya.

2. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Laporan Perubahan Aktiva Bersih merupakan laporan yang dapat memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.

3. Neraca

Tujuan neraca adalah menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam neraca dan penjelasannya dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai : (a) Kemampuan untuk melaksanakan kegiatan usaha secara berkelanjutan. (b) Likuiditas, solvabilitas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal. (c) Neraca mencakup struktur Perseroan secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Perhitungan Hasil Usaha
Tujuan utama laporan hasil usaha dalam periode tertentu adalah memberikan informasi pada para pengguna laporan keuangan untuk : (a) Mengetahui besarnya pendapatan dan beban investasi, (b) Mengetahui besarnya beban administrasi dan pendapatan lain-lain
5. Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas Perseroan dalam periode tertentu adalah memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan untuk: (a) Mengetahui kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas dan setara kas. (b) Mengetahui kebutuhan Perseroan dalam menggunakan arus kas tersebut.
6. Catatan atas Laporan Keuangan
Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai : (a) Gambaran umum Perseroan. (b) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. (c) Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan. (d) Pengungkapan hal-hal penting lain yang berguna untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan lain yang dapat mempengaruhi Perseroan secara keseluruhan.

Penerapan PSAK No. 18 (revisi 2010) pada PT. Taspen (Persero) Cabang Bogor

Mengingat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akan menggunakan *principle-based accounting standards* program yang memerlukan *professional judgment* seiring proses konvergensi ke *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Maka PSAK No. 18 (1994) tentang Akuntansi Dana Pensiun mengalami revisi menjadi PSAK No. 18 (revisi 2010) tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya, yang telah disesuaikan dengan IFRS. Untuk itu PT. Taspen (Persero) dalam menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan harus disesuaikan kembali dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, yaitu PSAK No. 18 (revisi 2010).

Dalam penerapannya PSAK No. 18 (revisi 2010) pada PT. Taspen dapat dilihat dari sebagai berikut :

1. Nilai kini aktuarial

Dalam PSAK No. 18 (revisi 2010) dijelaskan bahwa nilai kini dari manfaat pensiun dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan waktu purnakarya peserta. Dalam hal ini PT. Taspen (Persero) telah menerapkan PSAK No. 18 (revisi 2010) dalam perhitungan aktuarial, yaitu dengan menggunakan tingkat gaji kini.

Divisi Aktuaria PT. Taspen (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor : PD-11/DIR/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tanggung jawab Jabatan PT Taspen (Persero). Taspen sebagai perusahaan yang mengelola Dana Pensiun dan Asuransi tentunya memerlukan tenaga-tenaga aktuarial yang handal guna melakukan berbagai perhitungan bisnis perusahaan. Pelaksanaan valuasi produk Pensiun dan THT melalui perhitungan aktuarial meliputi : Perhitungan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD), Perhitungan Proyeksi iuran, Perhitungan Proyeksi klaim, Perhitungan Proyeksi kecukupan dana, Perhitungan unfunded Past Service Liability, Perhitungan proyeksi Manfaat Pensiun, Pengumpulan dan pengolahan data serta perhitungan-perhitungan aktuarial.

Contoh perhitungan aktuarial pada PT. Taspen (Persero) dalam perhitungan proyeksi klim untuk THT, yaitu sebagai berikut :

$$\text{THT Pensiun} = (0,60 \times \text{MI.1} \times \text{P.1}) + (0,60 \times \text{MI.2} \times (\text{P.2} - \text{P.1}))$$

Keterangan :

MI1 : Masa iuran terhitung mulai jadi peserta s/d saat kejadian

MI2 : Masa iuran terhitung mulai 1 Januari 2001 s/d saat kejadian

P1 : Penghasilan terakhir berdasarkan gaji pokok PP No. 6 tahun 1997

P2 : Penghasilan terakhir berdasarkan gaji pokok PP No. 11 tahun 2003

Contoh ilustrasi perhitungan THT (Tabungan Hari Tua) :

Tanggal Lahir	= 10-07-1947
Mulai Bekerja	= 01-07-1975
Status Keluarga	= Satu istri, Satu anak (K/1)
Gaji Pokok/Golongan	= Rp. 1.338.700,- / III D
Berhenti Pensiun	= 31-07-2003
MI1	= Dari 01-07-1975 s/d 31-07-2003 = 28 Tahun 1 Bulan
MI2	= Dari 01-01-2001 s/d 31-07-2003 = 2 Tahun 7 Bulan
P2	= Gapok Terakhir + Tunjangan Keluarga = Rp. 1.338.700,- + Rp. 160.644,- = Rp. 1.499.344,-
P1	= Gapok Terakhir + Tunjangan Keluarga = Rp. 488.500,- + Rp. 58.620,- = Rp. 547.120,-
Hak Asuransi	= $((0,60 \times 28) + (0,60 \times 1/12)) \times \text{Rp.} 547.120,- + ((0,60 \times 2) + (0,60 \times 7/12)) \times (\text{Rp.} 1.499.344,- - \text{Rp.} 547.120,-)$ = Rp. 10.694.919,20
Besar Manfaat THT	= Rp. 10.695.000,-

2. Penyajian nilai wajar pada investasi

Seluruh investasi menurut PSAK No. 18 (revisi 2010) disajikan pada nilai wajar. Dalam hal ini PT. Taspen telah menggunakan nilai wajar dalam penyajian nilai wajar pada seluruh investasi.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual atau dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi teratur antara peserta pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar mengambil mempertimbangkan karakteristik dari aset atau kewajiban yang akan dianggap oleh pelaku pasar yang tidak didasarkan pada penggunaan spesifik entitas, nilai wajar mempertimbangkan karakteristik dari aset atau kewajiban bahwa pelaku pasar akan mempertimbangkan. Dalam hal aset, karakteristik ini meliputi kondisi dan lokasi, dan pembatasan atas penjualan atau penggunaan.

Tujuan dari pengukuran nilai wajar adalah untuk memperkirakan harga dimana transaksi teratur untuk menjual aset atau untuk mentransfer kewajiban tersebut akan dilakukan antara peserta pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini.

3. Laporan Keuangan Dana Pensiun

Sebagai Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang mengelola program iuran pasti, PT. Taspen (Persero) dalam membuat laporan keuangan dana pensiun harus mengacu kepada PSAK No. 18 (revisi 2010).

Dalam PSAK No. 18 (revisi 2010) dijelaskan bahwa laporan keuangan dana pensiun program iuran pasti mencakup : Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.

Pendanaan dana pensiun

Sumber utama kekayaan dana pensiun adalah melalui iuran normal. Untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan metode perhitungan yang digunakan. Iuran normal memiliki dua jenis, yaitu :

1. Iuran Normal Pemberi Kerja. Dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan ditetapkan dengan perhitungan aktuaris.
2. Iuran Normal Peserta. Dibayarkan oleh peserta & ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Selain iuran normal, pendanaan dana pensiun juga berasal dari tambahan (khusus untuk Program Pensiun Manfaat Pasti) yang digunakan untuk menandai defisit yang timbul.

Pengaruh Perubahan PSAK No. 18 (1994) menjadi PSAK No. 18 (revisi 2010) terhadap Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun PSAK No. 18 (1994) dalam paragraf 24 mengatur bahwa laporan keuangan dana pensiun, baik yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) mencakup :

- a. Laporan Aktiva Bersih
- b. Laporan Perubahan Aktiva Bersih
- c. Neraca
- d. Perhitungan Hasil Usaha
- e. Laporan Arus Kas
- f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sedangkan menurut PSAK No. 18 (revisi 2010) yang efektif mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, laporan keuangan Program Imbalan Pasti dan Program Iuran Pasti (PIIP) menjadi laporan yang terpisah. PSAK No. 18 (revisi 2010) secara garis besar mensyaratkan laporan keuangan program manfaat purnakarya baik program iuran pasti maupun program manfaat pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Oleh karena itu PSAK No. 18 (revisi 2010) tidak mensyaratkan membuat neraca dalam laporan keuangannya. Adapun laporan tersebut antara lain :

- a. Laporan Keuangan Program Iuran Pasti, yang mencakup : Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi dari dana purnakarya.
- b. Laporan Keuangan Program Imbalan Pasti, yang mencakup salah satu dari :
 - Laporan yang menyajikan :
 - a) Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
 - b) Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji
 - c) Surplus atau defisit, atau
 - Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, termasuk salah satu dari :
 - a) Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, atau
 - b) Referensi nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji menyertai laporan aktuaris.

Dalam laporan imbalan pasti, pembayaran manfaat purnakarya terjanji bergantung pada posisi keuangan program purnakarya terjanji bergantung pada posisi keuangan program purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional program purnakarya.

Penyajian nilai wajar atas investasi dalam laporan keuangan program manfaat pasti mengalami perubahan, dalam PSAK No. 18 (1994) penyajian nilai wajar atas investasi Dana Pensiun, yaitu sebagai berikut :

- c. Uang tunai, rekening giro, dan deposito dinilai dengan nilai nominal
- d. Sertifikat deposito, Surat Berharga BI, Surat Berharga Pasar Uang, dan Surat Pengakuan Utang lebih dari satu tahun dinilai dengan nilai tunai
- e. Surat berharga yang diperjualbelikan dinilai dengan nilai pasar
- f. Penyertaan saham dinilai dengan nilai appraisal
- g. Investasi pada tanah dan bangunan dinilai dengan nilai appraisal

Sedangkan dalam PSAK No. 18 (revisi 2010) dijelaskan bahwa penyajian nilai wajar atas investasi dalam laporan keuangan dinilai dengan nilai wajar, sesuai dengan konvergensi IFRS.

Menurut PSAK No. 18 (1994) dijelaskan bahwa dalam laporan keuangan dana pensiun yang menyelenggarakan PPMP, perlu diungkapkan penjelasan yang memadai mengenai sumber perhitungan kewajiban aktuarial seperti metode penilaian dan asumsi aktuarial yang digunakan aktuaris, nama aktuaris dan tanggal laporan aktuaris yang terakhir. Sedangkan menurut PSAK No. 18 (revisi 2010) dijelaskan bahwa nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program imbalan pasti dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan waktu purnakarya peserta.

Dalam PSAK No. 18 (revisi 2010), neraca tidak termasuk dalam laporan keuangan, ada tiga alternative format, yaitu :

- a. Memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuaris dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat pasti juga berisi laporan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya dan dari terjanji.
- b. Mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuaris yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.
- c. Mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah.

Pelaporan akuntansi keuangan dana pensiun PT. Taspen (Persero) cabang Bogor dilaporkan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain dilaporkan, laporan keuangan dana pensiun ini dipertanggungjawabkan oleh pelaksana administrasi dana pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif diantaranya :

- a. Dapat dipahami. Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan dana iuran pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara dengan ketentuan yang wajar.
- b. Relevan. Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya, karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan.
- c. Keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
- d. Dapat dibandingkan. Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

PT. Taspen (Persero) cabang Bogor dalam pelaporan akuntansi keuangannya menggunakan konsep kelangsungan usaha, yang disusun berdasarkan asumsi bahwa entitas ekonomi melakukan usahanya secara berkesinambungan/melanjutkan kegiatannya dimasa depan dalam waktu yang tidak terbatas, kecuali terdapat tanda-tanda yang jelas akan likuidasi (*Going Concern*). Dasar laporan keuangan PT. Taspen (Persero) adalah berdasarkan dasar akrual dimana pengukuran aktiva, kewajiban,

pendapatan dan beban diakui serta dicatat dalam catatan akuntansi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, serta dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi pada masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan penerimaan kas dimasa depan.

Periode pelaporan keuangan dana pensiun PT. Taspen (Persero) cabang bogor disusun secara bulanan untuk disampaikan ke kantor pusat atau semesteran I (1 Januari-30 Juni) dan semesteran II (1 Juli-31 Desember) meliputi periode satu tahun buku. Laporan keuangan disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan (*corporate*) sebagai pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan keuangan perusahaan yang ditujukan terutama untuk kepentingan eksternal. Laporan keuangan ini dapat berupa laporan keuangan gabungan antara laporan keuangan pusat PT. Taspen (Persero) dan kantor cabang utama/kantor cabang PT. Taspen (Persero). Laporan keuangan kantor pusat PT. Taspen (Persero) disusun untuk dapat menggambarkan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada di kantor pusat PT. Taspen (Persero). Sedangkan laporan keuangan neraca saldo yang dibuat oleh kantor cabang utama/kantor cabang PT. Taspen (Persero) adalah sebagai wujud nyata pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan dana pensiun yang dilaksanakan oleh kantor cabang PT. Taspen (Persero) kepada kantor pusat PT. Taspen (Persero). Neraca saldo yang dibuat oleh PT. Taspen (Persero) cabang Bogor digunakan dasar penyusunan laporan keuangan di kantor pusat PT. Taspen (Persero).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan melakukan perbandingan PSAK No. 18 (1994) dan PSAK No. 18 (revisi 2010) serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT Taspen (Persero), maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan PSAK No. 18 (1994) dan PSAK No. 18 (revisi 2010) antara lain terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yang dimana ruang lingkup PSAK No. 18 (1994) hanya mencakup entitas dana pensiun, sedangkan ruang lingkup PSAK No. 18 (revisi 2010) tidak hanya mencakup entitas dana pensiun yang sering dianalogikan berhenti bekerja karena memasuki usia pensiun, tetapi juga mencakup seluruh entitas purnakarya yang diartikan berhenti bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan, hal ini termasuk kedalam ruang lingkup PSAK No. 18 (revisi 2010). Perbedaan yang lain antara lain pada perhitungan nilai kini aktuarial yang kini dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan waktu purnakarya peserta.
2. Pengaruh perubahan PSAK No. 18 (1994) menjadi PSAK No. 18 (revisi 2010) terhadap laporan keuangan antara lain terlihat dalam penyajian nilai wajar investasi yang terdapat dalam laporan aset neto tersedia untuk program manfaat purnakarya, yang dimana penyajian nilai wajar investasi menggunakan nilai wajar. Selain itu laporan keuangan program manfaat purnakarya kini dibagi menjadi dua laporan yang terpisah antara laporan keuangan program iuran pasti dan laporan keuangan program manfaat pasti.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dari simpulan diatas, maka saran yang dianjurkan yaitu seharusnya PT Taspen (Persero) perlu mengevaluasi solusi-solusi untuk menghadapi standar yang baru, misalnya dengan mengkomunikasikannya dengan regulator, penyiapan infrastruktur untuk pemenuhan ketentuan pelaporan keuangan, melakukan simulasi terhadap dampak pada saldo di laporan keuangan jika menggunakan PSAK No. 18 (revisi 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa dan Edia Handiman.(2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*.Jakarta: Indeks.
- Belkaoui Ahmed Riahi. 2004. *Teori Akuntansi*. Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.
- Indra Bastian, dan Suharjono, 2006. *Akuntansi Perbankan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Salemba Empat : Jakarta.
- Keiso Donald E.,Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2005. *Intermediate Accounting*. Wiley : New Jersey.
- Harmanto. 2002. *Akuntansi Keuangan Menengah*. BPE Yogyakarta : Yogyakarta.
- Helfert, Erich A. (2007). *Analisis Laporan Keuangan*. Erlangga : Jakarta.
- Horngren, Harison, dan Bamber. 2006. *Akuntansi Jilid 1*. PT. Indeks kelompok Gramedia : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya*. IAI : Jakarta.
- Kadarisman., dan Sari Wahyuni. 2010. *Manajemen Dana Pensiun Indonesia*. PT. Mediantara Semesta : Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. edisi kedua. 1995.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Marihot Manullang dan Dearlina Sinaga. 2005. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : ANDI.
- Natalia, P. dan Mulyana, Mumuh, *Pengaruh Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 2 No. 2, 2014 ISSN 2337 – 7860, pp. 119-128
- Ng Eng Juan dan Ersu Tri Wahyuni. 2012. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat : Jakarta.
- PT. Taspen. *Pedoman Akuntansi pada PT. Taspen*. Bogor
- Reeve, James M., Warren Carl S., dkk. 2008. *Principles Of Accounting*. Salemba Empat : Jakarta.
- Rick, Antle and Stanley J. Garstka. 2002. *Financial Accounting*, South Western : United States of America.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi ke 4. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta.
- Silvanita, Ktut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. PT. Gelora Aksara Pratama : Jakarta.
- Smith., Jay., Skousen.,Fred. 2004. *Intermdiate Accounting*. Erlangga : Jakarta.
- Sofyan, Syafri Harahap. 2002. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Soemarso S. R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi 5. Salemba Empat : Jakarta.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang *Dana Pensiun*.
- Vinayakam and B. Charumati. 2002. *Financial Accounting*. Company Ltd : New Delhi.